

KAPABILITAS MANUSIA DAN PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : SUATU UPAYA MENGATASI KESENJANGAN

HUMAN CAPABILITY AND SOCIAL CAPITAL UTILIZATION IN COMMUNITY EMPOWERMENT : AN EFFORT TO OVERCOME THE GAP

Maya Atri Komalasari

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram,
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115
mayaatrikomalasari@unram.ac.id

Naskah diterima 20 Juni 2019, direvisi 14 Juli 2019, disetujui 7 Agustus 2019

Abstract

Gaps are still happening and become a problem in Indonesia. Community Empowerment is one of the efforts that need to continue to overcome it. It is not enough to merely empower the community. More than that, the need for human capability and social utilization in community empowerment. Empowered as an individual or human is affirmed with attention to the expansion, the opportunity of access to life choices is the capability. Meanwhile, space to be empowered as a group and/or community as well as in line with the high social capital of society. Community empowerment should be able to consider and observe the capability aspects. In addition, it is also requires the utilization or optimization of social capital in the community.

Keywords: Human Capability, Social Capital, Community Empowerment, Gaps.

Abstrak

Kesenjangan yang masih saja terjadi dan menjadi masalah di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mengatasinya. Tidak cukup hanya sekedar pemberdayaan masyarakat semata yang dibutuhkan. Lebih dari itu perlunya kapabilitas manusia dan pemanfaatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Berdaya sebagai seorang individu atau manusia ditegaskan dengan perhatian pada perluasan, kesempatan akses pilihan-pilihan hidup yakni kapabilitas. Sementara itu, ruang untuk berdaya sebagai suatu kelompok dan atau masyarakat juga seiring sejalan dengan tingginya modal sosial masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat hendaknya sejak awal mampu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kapabilitas. Selain itu, juga memerlukan pemanfaatan atau pengoptimalan modal sosial dalam masyarakat.

Kata kunci : Kapabilitas Manusia, Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kesenjangan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan seolah menjadi kata yang begitu akrab di telinga hingga kini. Setidaknya dari masa berlangsungnya orde baru yang juga berjasa mempopulerkannya. Pada pemerintahan orde baru memang pemerintah begitu menggaungkan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kentara seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan tentunya pembangunan fisik dengan dibangunnya banyak infrastruktur.

Umumnya orang awam mengindentikkan pembangunan lebih soal fisik semata. Pandangan tersebut tidak lepas dari masifnya pembangunan yang lebih banyak menasar pada pembangunan yang sifatnya fisik pada masa orde baru seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga capaian-capaian yang sifatnya fisik dan materiil seperti pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur yang seakan tunggal pada masa itu. Tetapi pembangunan itu sendiri sebenarnya tidak

hanya menyangkut dan bersifat fisik atau materi semata. Lebih dari itu, pembangunan merupakan upaya yang sejatinya mencakup soal materi dan non materi.

Belakangan, berbagai pihak yakni pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan penggiat/aktivis masyarakat menyadari kondisi tersebut. Mereka mulai melakukan berbagai cara dan upaya terkait meluruskan pandangan orang awam terkait pembangunan yang seperti masa lalu, selalu diidentikan dengan pembangunan fisik dan mengabaikan pembangunan non fisik.

Pemberdayaan masyarakat yang mulai banyak dilakukan beberapa kurun waktu terakhir ini, seakan menjadi salah satu upaya yang mampu menggugah kesadaran akan esensi pembangunan yang sebenarnya yakni manusianya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang pada akhir tujuannya melahirkan kemandirian sekaligus menjadi upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan Indonesia yang kini mulai memperhatikan aspek non fisik dan non materi dengan adanya berbagai upaya pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang baik. Namun begitu, harus diakui bahwa hal tersebut belumlah cukup. Karena pembangunan di Indonesia masih mengalami masalah yang amat klasik namun berpengaruh besar yakni kesenjangan. Kesenjangan atau masalah belum meratanya pembangunan di Indonesia bahkan menjadi masalah yang penting hingga saat ini. Setidaknya hal ini tampak jelas dari angka atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2016 yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) diketahui bahwa IPM Indonesia untuk tahun 2015 adalah 0.689 dan menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah (Dusntan, 2017). Dari segi tren, memang terjadi kenaikan angka IPM Indonesia, Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990 mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama

bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Sayangnya, jika memperhitungkan kesenjangan atau ketimpangan IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen), terutama kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik (Dusntan, 2017). Tidak mengherankan jika angka IPM dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang mengalami kenaikan justru menurunkan peringkat Indonesia. Meskipun angka IPM Indonesia sudah mencapai 0,689 pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan dari 0,686 pada tahun 2014, namun peringkat IPM Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 110 menjadi 113 dari 188 negara (Tim Viva, 2017).

Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, IPM Indonesia sebesar 71,39, meningkat sekitar 0,82 dibanding sebelumnya sebesar 70,81 pada 2017 (CNN Indonesia, 2019). Jumlah tersebut tergolong tinggi dan meningkat dari tahun sebelumnya. Namun begitu, kesenjangan masih tampak terutama jika melihat capaian IPM semua provinsi. Berdasarkan provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,47, diikuti oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 79,53, Provinsi Kalimantan Timur 75,83, Provinsi Kepulauan Riau 74,84, dan Provinsi Bali 74,77. Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Diikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Provinsi Kalimantan Barat 66,98 (CNN Indonesia, 2019). Data-data tersebut seakan menegaskan bahwa isu pemerataan atau kesenjangan masih menjadi masalah pelik.

Terkait dengan kesenjangan yang masih saja terjadi, maka pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang perlu terus dilakukan. Terlebih mampu berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia. Karena pemberdayaan masyarakat pada akhirnya akan menjadikan orang, kelompok, masyarakat yang mandiri. Dengan kata lain, spirit pemberdayaan masyarakat sesuai dengan esensi pembangunan yang mencakup sisi materi dan non materi. Karena itu tulisan ini bermaksud untuk memaparkan

bagaimana kapabilitas manusia dan pemanfaatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia.

B. TINJAUAN TEORETIS

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan (Sulistiyani, 2004). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga memberdayakan tersebut adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2010). Pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Widjajanti, 2011)

Pemberdayaan masyarakat dapat pula dimaknai sebagai suatu proses dan suatu hasil. Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau kemampuan personal, interpersonal atau politik, sehingga individu, keluarga atau masyarakat mampu melakukan tindakan guna memperbaiki situasi-situasi yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan sebagai sebuah hasil, pemberdayaan menunjuk pada tercapainya sebuah keadaan yaitu keberdayaan atau keberkuasaan yang mencakup *state of mind* dan *reallocation of power* (Suharto, 2006 dikutip dalam Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI. Pembangunan Sosial, 2010).

Pemberdayaan identik dengan daya atau kekuatan. Tentu saja berbicara tentang pemberdayaan berarti terkait dengan kekuatan atau bahkan kekuasaan. Dalam konseptualisasi

tentang pemberdayaan (*empowerment*), setidaknya terdapat tiga keterkaitannya dengan kekuatan atau bahkan kekuasaan (Kabeer, 1999) yang antarlain:

- a. Sumber daya/ *Resources* (pre-kondisi) yang meliputi material, sumber daya manusia dan sumber daya sosial/aset seperti modal sosial. Untuk menjadi berdaya (*empowered*) atau kuat (*powerful*) tidak hanya akses tetapi juga kemampuan mengontrol sumber daya yang mungkin menentukan (Karbeer, 1999).
- b. Agensi/*Agency* (proses) yang merujuk pada memiliki cara atau keterampilan untuk menentukan tujuan/sasaran dan berupaya ke arah tersebut (Karbeer, 1999). Hal tersebut terdiri dari yang tampak semu dalam pengambilan keputusan (seperti pengambilan keputusan, protes, tawar-menawar dan negosiasi) selayaknya motivasi (rasa sebagai agen atau adanya kekuasaan di dalamnya) yang menstimulasi individu untuk beraksi (Kabeer, 1999: 438; 2003: 171; Mayoux, 2000). Mayoux's (2000)
- c. Pencapaian/*Achievment* (*outcomes*) yang ditunjukkan dari sejauhmana dapat menerjemahkan potensi-potensinya menuju pencapaian yang positif (seperti pengembangan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan) untuk memastikan kesejahteraan (*well-being*) (Kabeer, 1999; 2003).

Sementara itu, dalam proses pemberdayaan masyarakat tentunya terdiri atas pihak-pihak yang dikategorikan sebagai yang dalam kondisi tidak berdaya dan juga pihak yang membantu, menjembatani mereka yakni fasilitator. Edi Suharto (2009) mengkatagorikan beberapa kelompok tidak berdaya /lemah sebagai berikut : Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis; Kelompok lemah khusus, misalnya : manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing; Kelompok lemah secara personal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga. Fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat berkedudukan sebagai “*outsiders*”, bukan pemeran utama serta kehadirannya tidak menimbulkan ketergantungan pada masyarakat

(Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI, 2010)

Terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Strategi-strategi tersebut memang cukup bervariasi dan berbeda antara satu dengan yang lain. Namun setidaknya terdapat 3 strategi utama pemberdayaan yang akan menjadi perhatian saat melakukan pendampingan pada masyarakat. Menurut Edi Suharto (2009), strategi pemberdayaan meliputi :

- a. Aras mikro : pemberdayaan dilakukan terhadap seseorang secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini seringkali disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras mezzo : pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang, dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai teknik dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap seseorang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras makro : juga disebut sebagai strategi sistem besar, sebab sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, merupakan beberapa teknik yang digunakan dalam pendekatan ini. Aras makro memandang seseorang sebagai individu yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, serta dapat memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2. Kapabilitas Manusia

Adalah seorang ekonom Amartya Sen yang tidak hanya menekankan pembangunan sebatas pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai penciptaan ruang kebebasan yang lebih

luas (Winarno, 2011: 85). Ia juga yang akhirnya memperkenalkan teori dan konsep terkait kapabilitas. Menurutnya kapabilitas seseorang, merupakan kombinasi pelbagai kemungkinan manusia yang bisa ia peroleh untuk menjalankan fungsi dalam hidupnya. Kapabilitas dengan kata lain adalah sebuah bentuk kebebasan untuk mencapai berbagai pilihan dalam menjalankan fungsi hidup (Basri, 2002: 91).

Untuk memahami konsep kapabilitas ini, Sen memaparkan analisisnya pada kasus orang yang berpuasa dan yang memang mengalami derita kelaparan. Seseorang yang berpuasa misalnya, dapat menjalankan fungsi yang sama untuk hidup seperti mereka yang miskin dan terpaksa lapar, dalam hal jumlah makanan atau gizi yang mereka konsumsi, tetapi mereka memiliki "perangkat kapabilitas" (*capabilityset*) lebih besar dibanding mereka yang miskin; yang pertama dapat memilih makan lebih enak sedangkan yang kedua tidak (Basri, 2002). Terdapat perbedaan diantara mereka, yakni yang berpuasa mengalami kelaparan karena pilihannya atau kehendaknya sendiri sedangkan yang benar-benar menderita kelaparan justru tidak memiliki pilihan.

Dengan konsep kapabilitasnya ini, Sen mencoba melihat kemiskinan dari sisi lain yang belum banyak disentuh. Kemiskinan atau orang miskin itu menjadi miskin karena ruang kapabilitas mereka kecil, bukan karena mereka tidak memiliki barang. Hal ini menyebabkan kebebasan menjadi penting. Kebebasan adalah syarat utama supaya sebuah tindakan untuk memiliki sesuatu menjadi mungkin, dan kebebasan ini harus dilihat dari dua hal: "proses" dan "kesempatan" (Basri, 2002).

Menurut Sen, kemiskinan berkaitan dengan *freedom of choice (Kebebasan terhadap pilihan-pilihan)* (Slamet, 2012). Orang-orang miskin sama sekali tidak memilikinya karena terjadi perampasan terhadap kapabilitasnya (*capability deprivation*), seperti misalnya yang dialami petani miskin di pedesaan (Slamet, 2012) yaitu :

- a. *Structural deprivation* : struktur berkaitan 1). *Power relations*, dimana posisi petani selalu dalam posisi yang lemah, 2). Adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, 3). Dualisme ekonomi yang muncul dalam wajah baru.

- b. *Social capability deprivation*: orang miskin tidak dapat meraih kesempatan, informasi, pengetahuan, ketrampilan, partisipasi dalam organisasi.
- c. *Economic capability deprivation*: tidak dapat mengakses fasilitas keuangan pada lembaga-lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan terjebak kaum rentenir yang tidak memerlukan prosedur berbelit-belit.
- d. *Technological capability deprivation*: tidak dapat mengakses teknologi baru yang memerlukan modal yang cukup besar. Teknologi tradisional seperti pembuatan alat dari bahan-bahan lokal (tanah, bambu, kayu dll) telah digantikan oleh alat-alat pabrikan.
- e. *Political capability deprivation*: tidak mampu memengaruhi keputusan politik yang dirumuskan oleh para wakil rakyat atau tidak didengarkan aspirasinya, tidak memiliki kemampuan melakukan tindakan kolektif atau *collective actions*.
- f. *Psychological deprivation*: memperoleh stigma sebagai orang yang kolot, bodoh, malas, tidak aspiratif. Stigma ini yang berakibat mereka menjadi rendah diri dan merasa disepelkan, merasa teralienasi di dalam kehidupan sosial dan politik.

3. Modal Sosial

Beberapa tokoh memberikan definisi tentang modal sosial. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai "sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan" (Field, 2010:23). Dengan demikian, modal sosial merujuk pada relasi-relasi sosial, institusi, norma sosial dan saling percaya antara orang dan atau kelompok lain serta mempunyai efek positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas.

Definisi lain modal sosial berasal dari Robert Putnam yang mengartikan modal sosial sebagai *features of social organization that can improve the efficiency of society* (bagian-bagian dalam organisasi sosial yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat). Menurutnya terdapat tiga bentuk atau unsur modal sosial yaitu : *trust*

(kepercayaan), *norms* (norma) dan *networks* atau jaringan-jaringan horizontal *civic engagement* (Wijaya, 2007 : 76-77)

Selain kedua tokoh tersebut, Francis Fukuyama pun memberikan pengertian pada modal sosial, yaitu "sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar diantara anggota kelompok yang memungkinkan kerja sama terjadi diantara mereka" (Leksono, 2009: 40). Sementara itu, Bank Dunia memahami modal sosial sebagai "modal atau kapital sosial menunjuk pada norma, institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama" (Lawang, 2004: 213).

Dari sekian definisi mengenai modal sosial dari berbagai tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya modal sosial merupakan suatu hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya norma-norma tertentu dan keadaan tertentu. Dalam prosesnya modal sosial tersebut juga akan menghasilkan kepercayaan, jaringan, dan nilai-nilai (norma) tertentu yang mempermudah terjalinya kerjasama antara orang yang terlibat dalam suatu hubungan, baik dalam kelompok kecil, asosiasi atau masyarakat sekalipun.

C. PEMBAHASAN

Kesenjangan atau ketimpangan antar provinsi di Indonesia terbaca dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) IPM tahun 2016. IPM terendah ada di Provinsi Papua, yakni 58,05, dan tertinggi ada di DKI Jakarta, sebesar 79,60. Sedangkan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka harapan hidup saat lahir terendah ada di Sulawesi Barat 64,31 tahun, dan tertinggi ada di DI Yogyakarta 74,71 tahun. Sementara itu, untuk dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah terendah ada di Provinsi Papua, 10,23 tahun, sedangkan tertinggi ada di DI Yogyakarta selama 15,23 tahun. Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan pengeluaran per kapita terendah, sebesar Rp 6,6 juta per tahun, dan DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan Rp 17,5 juta per tahun (Nordiansyah, 2017).

Gini ratio adalah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di daerah atau provinsi. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi gini ratio menunjukkan ketimpangan di suatu daerah atau provinsi yang semakin tinggi. Berdasarkan

data BPS, gini ratio seluruh provinsi, tercatat rata-rata gini ratio Maret 2017 sebesar 0,393. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407 atau turun dibandingkan dengan gini ratio pada September 2016 yang mencapai 0,409. Sementara gini ratio di perdesaan pada Maret 2017 naik sebesar menjadi 0,320 dari September 2016 yang hanya 0,316. Selain itu, terdapat tiga daerah yang mencatat ketimpangan tertinggi yaitu DI Yogyakarta dengan gini ratio sebesar 0,432; Provinsi Gorontalo dengan gini ratio 0,430 dan DKI Jakarta dengan gini ratio 0,413 (Artanti, 2017).

Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018 dari BPS diketahui bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan dan tergolong pada angka yang tinggi yakni 71,39. Walaupun peningkatan ini perlu kita apresiasi karena memang berbagai indikator seperti harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita semuanya mengalami peningkatan (CNN Indonesia, 2019). Sayangnya, kesenjangan IPM berdasarkan yang tertinggi dan terendah pada level Provinsi di Indonesia masih tampak jelas. IPM berdasarkan provinsi yang tertinggi ialah DKI Jakarta dengan 80,47 dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan angka sebesar 60,06.

Kesenjangan yang masih terjadi di Indonesia menjadi salah satu jawaban mengapa kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat belum dapat direalisasikan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintahan yang berkuasa saat ini. Namun begitu, jika persoalan ini hanya dibebankan pada pemerintah saja tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Mengingat kesenjangan sendiri adalah masalah yang begitu pelik, menyangkut banyak aspek serta keterbatasan kemampuan pemerintah sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya upaya untuk mengatasi kesenjangan ini juga berada pada kita semua atau masyarakat.

Peran masyarakat dalam berkontribusi mengurangi kesenjangan dalam pembangunan dapat dilakukan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tujuan pemberdayaan yang mengarahkan pada "kemandirian". Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga memiliki keunggulan jika

dibanding dengan bentuk kegiatan lainnya. Mengingat pemberdayaan masyarakat dapat menysasar langsung pada pihak-pihak yang dirasa mengalami suatu kondisi yang tidak berdaya atau tidak kuasa.

4. Pemberdayaan Masyarakat yang Seperti Apa?

Selama ini telah banyak juga berbagai pihak yang giat melakukan pemberdayaan masyarakat. Mereka melakukan pemberdayaan masyarakat pada berbagai kelompok masyarakat seperti petani, perempuan, ibu rumah tangga, orang dengan difabilitas dan sebagainya. Berbagai bidang seperti kesehatan, kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, kewirausahaan juga telah banyak dilakukan. Tetapi kenyataannya, secara nasional kesenjangan pun masih saja terjadi. Meskipun begitu, kita tidak dapat menampik kenyataan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan juga membuahkan hasil yang dirasakan masyarakat setempat atau lokal.

Untuk mengatasi kesenjangan, maka upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perlu adanya kebaruan dan peningkatan. Kebaruan yang dimaksud yakni sejak awal telah memperhatikan aspek-aspek kapabilitas seseorang. Bahwa kebebasan dan kemampuan seseorang untuk dapat mengakses peluang-peluang dalam hidup perlu ditekankan. Karena selama ini yang selalu dipahami bahwa kemiskinan misalnya dilihat atau dianggap karena kurangnya sumber pendapatan. Tetapi kondisi-kondisi yang menyebabkan orang-orang tidak dapat mengakses sumber pendapatan justru terabaikan.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya sejak awal mampu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kapabilitas tersebut. Karena pemberdayaan masyarakat pun menjadi upaya penguatan yang tidak saja dari dimensi ekonomi, namun mencakup dimensi sosial dan politik. Dengan kata lain, seharusnya tiap upaya pemberdayaan masyarakat terlekat upaya untuk memandirikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan politik.

Tidak jarang yang terjadi di lapangan banyak upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai pihak namun hanya

menyasar kemandirian secara ekonomi yakni dengan meningkatnya pendapatan (materi) masyarakatnya semata. Sementara, perluasan kesempatan atau peluang masyarakat dalam mengakses sumber daya lain seperti informasi, pengetahuan, ketrampilan, partisipasi dalam organisasi, aspirasinya secara politik yang tidak didengar bahkan diakomodasi, tidak tersentuh upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, konsep kapabilitas manusia penting untuk selalu disertakan dalam tiap upaya pemberdayaan

Selain kapabilitas, pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kesenjangan memerlukan pemanfaatan atau pengoptimalan modal sosial dalam masyarakat. Hal ini penting karena modal sosial sendiri memiliki peran terhadap pembangunan manusia. Beberapa dimensi pembangunan manusia bahkan sangat dipengaruhi oleh modal sosial, antarlain: kemampuan untuk menyelesaikan problem kolektif, mendorong roda perubahan yang cepat di tengah masyarakat, memperluas kesadaran bersama bahwa banyak jalan yang bisa dilakukan oleh tiap anggota kelompok untuk memperbaiki nasib secara bersama, memperbaiki mutu kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan (Hasbullah, 2006:38).

Modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat dengan ditandai dengan tingginya tingkat kepercayaan, kerjasama antar warganya berdampak positif bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Pertama, hal ini membuat kemungkinan program atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berhasil karena kebiasaan saling percaya dan kerjasama telah terjalin dengan baik. Kedua, modal sosial yang tinggi mencirikan adanya komunikasi yang baik dan lancar antar warganya sehingga dalam penyelesaian masalah atau pencarian solusi pasti lebih efektif. Ketiga, tingginya modal sosial dalam suatu masyarakat akan mendukung keberlanjutan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat

5. Kapabilitas Manusia dan Pemanfaatan Modal Sosial

Pemberdayaan masyarakat yang mulai memperhatikan kapabilitas manusia serta pemanfaatan modal sosial menjadi salah satu

jalan mengatasi masalah kesenjangan. Hal ini disebabkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan langsung menyentuh sasaran yakni pihak yang menjadi korban kesenjangan atau yang tidak berdaya dan tidak berkuasa. Selain itu, upaya tersebut juga mengakui dan memberikan ruang bagi tiap manusia untuk berdaya secara individu dan berdaya sebagai kelompok atau masyarakat.

Berdaya sebagai seorang individu atau manusia ditegaskan dengan perhatian pada perluasan, kesempatan akses pilihan-pilihan hidup yakni kapabilitas. Sementara itu, ruang untuk berdaya sebagai suatu kelompok dan atau masyarakat juga seiring sejalan dengan tingginya modal sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yang mulai memperhatikan kapabilitas manusia serta pemanfaatan modal sosial yang tujuan akhirnya kemandirian mampu mengakomodasi ruang berdaya secara individu sekaligus ruang berdaya sebagai kelompok atau masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang mulai memperhatikan kapabilitas manusia serta pemanfaatan modal sosial ini mulai sudah diterapkan di berbagai pihak di Indonesia. Salah satunya ialah Yayasan Hidung (YHM). YHM merupakan suatu yayasan pendidikan berbasis kesenian yang didirikan pada Februari 2008, memiliki misi memberdayakan kaum muda yang kurang mampu, dan mendukung pendidikan anak-anak Indonesia melalui pagelaran sirkus dan seni lain (Anonin, 2012). Pemberdayaan dilakukan pada anak-anak kampung nelayan di Cilincing, Jakarta Utara yang notabene daerah tergolong sebagai daerah kumuh dan menjadi tempat bermukim masyarakat kalangan ekonomi bawah.

Pemberdayaan yang dilakukan YHM juga berwujud bantuan pendidikan atau beasiswa serta pelajaran tambahan, seperti pengajaran bahasa Inggris agar mereka tidak putus sekolah. Dengan pemberdayaan yang diberikan tersebut, YHM juga telah membantu memperluas kapabilitas anak-anak Cilincing. YHM juga berupaya menghubungkan mereka dengan donatur-donatur yang bersedia membiayai sekolah. Perluasan kapabilitas dilakukan dengan

memberikan akses pendidikan yang sebelumnya sangat sulit mereka akses.

Pemberian atau perluasan kapabilitas pun mulai diperhatikan dengan mengajarkan anak-anak bermain sirkus. Menurut mereka, dengan mengajarkan anak-anak ini keahlian bermain sirkus, bertujuan menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai kegigihan, ketekunan, percaya pada diri sendiri dan pada teman, kerjasama, dan lain sebagainya. Mereka yakin bahwa nilai-nilai tersebut yang dapat memicu anak-anak untuk memiliki semangat dalam hidup, yang akhirnya mendorong mereka untuk memiliki imajinasi dan mimpi-mimpi akan masa depan yang lebih baik (<http://www.rednosefoundation.org>).

Kapabilitas manusia sendiri mau tidak mau menyaratkan adanya kebebasan yang dimiliki oleh tiap individu. Kebebasan yang dimaksud disini lebih dekat dengan yang diterjemahkan oleh Amartya Sen. Sen bahkan menyatakan bahwa kebebasan merupakan tolok ukur pembangunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yang meliputi:

- a. Alasan evaluatif, penilaian atas keberhasilan pembangunan dipahami berdasarkan sejauh mana kebebasan manusia meningkat. Dengan peningkatan kebebasan manusia akan semakin mampu mengungkapkan dan berusaha memenuhi kebutuhannya dalam pembangunan
- b. Alasan efektivitas, keberhasilan pembangunan sepenuhnya tergantung manusia yang bebas. Dengan kebebasan yang dimilikinya manusia menentukan tujuan dan cara pemenuhan kebutuhannya (Indro, 2013).

Yang dilakukan YHM lakukan dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak Cilincing memperluas kapabilitas mereka karena berhasil menghapus stigma sebagai anak nelayan yang marginal dan menjadikan pribadi atau manusia yang percaya diri seperti manusia lainnya. Atau dengan kata lain, yang dilakukan YHM adalah mengatasi keterampasan psikologi atau *Psychological deprivation*. Kegiatan tersebut bahkan secara tidak langsung memperkuat modal sosial antar warga masyarakatnya dengan

selalu bertemu dan bekerja sama sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan YHM lebih efektif dan berkelanjutan.

Selama ini yang banyak terjadi dimensi psikologis banyak terabaikan. Hal ini disebabkan bahwa yang selalu menjadi sasaran dalam upaya pemberdayaan adalah hasil-hasil yang sifatnya material seperti peningkatan pendapatan atau keterampilan. Padahal dimensi psikologis pun berkontribusi juga. Dimensi psikologis dari upaya pemberdayaan penting sebagai bentuk kekuatan yang berasal benar-benar dari dalam diri seorang individu. Dimensi psikologis tersebut meliputi : kebermaknaan (*meaningfulness*), kompetensi (*competence*), dan penentu nasib sendiri (*self-determination*) (Hossein, et.al, 2012).

Kebermaknaan (*meaningfulness*) mengindikasikan individu mampu mengapresiasi tujuan-tujuan karir menurut standar dan cita-citanya, pada sistem nilai kerja yang dianggap signifikan dan yang dirasa penting saat mereka berpartisipasi dalam kegiatan organisasi (Tubbs and Moss, 2000). Secara sederhana kebermaknaan disini berarti saat seorang individu dapat menyadari sepenuhnya bahwa ia yang hidup saat ini adalah berarti atau bermakna dengan memiliki tujuan dan cita-cita dalam hidupnya.

Kompetensi (*competence*) disini berarti bahwa saat seseorang menjadi kompeten/berkompeten mereka merasa terpenuhi atau mereka memenuhi syarat dan mereka memiliki *skill* yang cukup dan kecakapan untuk menunjukkan keberhasilan dalam pekerjaan. Tidak hanya orang yang mampu yang merasa mereka memenuhi kualifikasi, tetapi mereka merasa percaya diri dan mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan kompeten (Amichai et al, 2008).

Penentu nasib sendiri (*self-determination*) dalam hal ini seseorang/ seorang pekerja yang mampu merasa bertanggung jawab dan kepemilikan terhadap aktivitas mereka (Littrell, 2007). Mereka merasa memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk menunjukkan tanggung jawabnya, mereka dapat membuat keputusan-keputusan tentang usaha/upaya mereka dan memiliki kewenangan yang cukup tentang cara,

waktu dan kecepatan melakukan tugas (Vecchio, 2000). Dengan kata lain, saat seseorang atau individu telah memiliki rasa dan menyadari bahwa ia merupakan penentu nasibnya sendiri maka hal itu mencakup sesuatu yang luas, mulai dari menyadari dan memiliki kebebasan menentukan pilihan serta memiliki kewenangan untuk mewujudkan upaya tersebut.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan YHM merupakan contoh pemberdayaan yang memperhatikan kapabilitas manusia sekaligus memperhatikan dimensi psikologis yang seringkali banyak terabaikan. Mengajak anak bermain sirkus hingga memiliki keterampilan bermain sirkus mungkin kelihatannya dipandang sebagai hal yang tidak memiliki kaitan dengan upaya pemberdayaan. Namun sebenarnya hal itulah yang penting.

Sirkus pada anak sendiri memberikan suasana atau kondisi yang menyenangkan (*fun*) yang dapat menciptakan kenyamanan dalam relasi antara pemberdaya dan mereka yang menerima daya. Dalam hal ini penciptaan kondisi tersebut juga amatlah penting hingga proses pemberdayaan dapat berjalan lancar. Selanjutnya usaha YHM mengajarkan anak-anak keterampilan atau keahlian bermain sirkus juga upaya menumbuhkan kepercayaan, keyakinan pada diri anak. Terlebih yang mereka tuju adalah anak pinggiran yang notabene berbeda dan cenderung memiliki status sosial dan ekonomi menengah ke bawah. Umumnya mereka diliputi rasa tidak percaya diri atau minder dibanding anak pada umumnya yang tidak seperti mereka.

Permainan sirkus bagi upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh YHM merupakan media yang sekaligus menunjukkan bahwa mereka telah memahami kapabilitas manusia dalam proses pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, hal tersebut menandakan bahwa mereka juga memahami bagaimana peran penting dimensi psikologis yang hendaknya melekat dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberian kemampuan untuk berbahasa Inggris merupakan contoh membangun kapabilitas manusia. Terlebih di era globalisasi yang menuntut konektivitas dalam level internasional. Tentu saja banyak lapangan pekerjaan yang

memerlukan dan membutuhkan keterampilan dan keahlian berbahasa Inggris karena bahasa tersebut menjadi bahasa populer dan banyak digunakan di kalangan internasional.

Dengan demikian, pemberian keterampilan berbahasa Inggris dalam suatu pemberdayaan merupakan bentuk adanya pelibatan kapabilitas manusia. Kapabilitas manusia dalam hal ini ialah kemampuan, keterampilan berbahasa Inggris sebagai salah satu akses untuk nantinya memasuki dunia pendidikan maupun dunia kerja. Dalam hal ini memiliki kemampuan atau keterampilan berbahasa Inggris menjelmakan menjadi akses bagi seseorang, terutama bagi anak-anak di kampung nelayan yang umumnya berasal dari kalangan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Secara sederhana upaya tersebut juga berarti memberikan kebebasan bagi mereka untuk dapat memilih lapangan pekerjaan yang beragam dan sesuai dengan bakat dan minatnya.

Dengan kemampuan yang ia miliki berbahasa Inggris dapat membuka peluang untuk memperlebar pilihan-pilihan dalam hidup yang dapat diambil. Pilihan tersebut misalnya pilihan-pilihan dalam memperoleh pekerjaan. Jika dibandingkan dengan sebagai anak yang berasal dari kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah yang dapat Berbahasa Inggris berarti mereka memiliki akses untuk mencari pekerjaan yang lebih beragam serta dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula. Dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tidak dapat mereka akses, menjadi mungkin dan realistis mereka capai. Terlebih dengan adanya program beasiswa yang disediakan YHM. Karena dalam program beasiswa umumnya melibatkan pihak-pihak lain yang bekerja sama dan tercipta jaringan (*networking*) yang baik antara mereka.

Modal sosial berperan dalam suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bahkan hendaknya dalam tiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus terlekat adanya modal sosial di dalamnya. Tentu dalam prosesnya, pemberdayaan masyarakat yang baik hendaknya melekat pada pelaksanaan upaya pemberdayaan yang tampak antara pemberi daya dan penerima daya. Hal tersebut untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik.

Kehadiran modal sosial tidak berhenti pada proses pemberdayaan masyarakat masih berlangsung saja. Karena banyak terjadi upaya pemberdayaan masyarakat di Indonesia sifatnya temporer dan kurang berkelanjutan. Umumnya hal ini berkaitan dengan keterbatasan dana dan program pemberdayaan masyarakat lebih sebagai bentuk proyek temporer daripada upaya terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan.

Modal sosial sekaligus menjadi kunci dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang dapat berlangsung terus-menerus, konsisten dan berkelanjutan. Modal sosial sangat berperan dalam keberlangsungan proses pemberdayaan. Hal ini berarti bahwa modal sosial yang nantinya dibangun dalam proses pemberdayaan oleh pemberi dan penerima daya dapat terus berlangsung meski pemberdayaan tersebut hanya sebagai program atau proyek yang temporer semata.

Banyak program atau proyek pemberdayaan masyarakat yang temporer maka menghadapi tantangan terkait keberlanjutan. Hal ini biasanya diakibatkan dengan kesediaan dana dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, modal sosial baik kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jaringan (*link*) antara pemberi daya dan penerima daya perlu dikembangkan. Modal sosial tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sekalipun sudah tidak lagi ada dana, relasi antara pemberi daya dan penerima daya tidak berarti selesai dan terputus begitu saja. Selain itu pula, pemberdayaan sendiri tidak berarti pemberian sumber dana semata. Namun lebih dari itu, pemberian pendampingan, perhatian dan kepedulian terhadap pihak penerima daya adalah hal penting yang perlu berkelanjutan. Bahkan hingga mereka berada pada posisi yang sama, yakni sama-sama berdaya.

D. SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia. Disebabkan pemberdayaan masyarakat dapat menysasar langsung pada pihak-pihak yang mengalami suatu kondisi yang tidak berdaya atau tidak kuasa. Untuk mengatasi kesenjangan, maka

upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perlu adanya kebaruan dan peningkatan. Bahwasanya kebebasan dan kemampuan seseorang untuk dapat mengakses peluang-peluang dalam hidup perlu ditekankan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya sejak awal mampu mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kapabilitas. Selain itu, juga memerlukan pemanfaatan atau pengoptimalan modal sosial dalam masyarakat. Saran yang disusun dalam kajian ini banyak upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi harus diakui bahwa, masih belum banyak pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memperhatikan perluasan kapabilitas manusia. Semoga pada masa mendatang perluasan kapabilitas menjadi tujuan yang sekaligus terlekat dengan "kemandirian". Selain itu, pemanfaatan dan pengoptimalan berbagai sumber daya yang dimiliki aktor maupun masyarakat seperti modal sosial mutlak dilakukan. Karena memiliki dampak positif dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, pembimbing yang selalu memberikan arahannya sehingga naskah ini dapat terselesaikan, tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan harapan agar tulisan ini bermanfaat untuk menjadi literature dalam penulisan yang lain

Daftar Pustaka

- Amichai. . H, Katelyn. Y. A. M and Samuel. A. 2008. "Assessment of organisational involvement in implementing empowerment", *Journal of computers in human behavior*, Vol.14, No, 1, PP 34-49.
- Anonim, 2012. *Kembali Mengenyam Pendidikan Berkat Si Hidung Merah*. Edisi 30 Juni 2012 diakses dari <http://diamma.com/2012/06/30/kembali-mengenyam-pendidikan-berkat-si-hidung-merah/> diakses pada 3 Agustus 2017 jam 11.28 WIB

- Artanti, A.A. 2017. *Maret 2017, Gini Ratio Sebesar 0,393*. Edisi 17 Juli 2017 diakses dari pada <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/4bazLmJk-maret-2017-gini-ratio-sebesar-0-393> diakses pada 3 Agustus 2017 jam 10.26 WIB.
- Basri, M. C. 2002. Amartya Sen: Pilihan dan Kemiskinan. *Jurnal Kebudayaan Kalam Vol. 19 tahun 2002*.
- CNN Indonesia. 2019. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2018 Naik, Tapi Masih "Jomplang" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415140212-532-386501/indeks-pembangunan-manusia-2018-naik-tapi-masih-jomplang> diakses tanggal 29 Oktober 2019
- Dunstan, I. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkatkan tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada*. Edisi 22 Maret 2017 diakses dari <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html> Pada 3 Agustus 2017 jam 9.57 WIB.
- Field, J. 2010. *Modal Sosial*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Hosein, R. D, Palangi A. S, Abooei M. I, Akbarzadeh J. 2012. An Analysis of the Empowerment level of Employees and It's Relation to Organizational Factors. *International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 15; August 2012*
- Indro, P.Y. N. 2013. Kemiskinan Global dalam Perspektif "Development as a Freedom" Amartya Sen Kasus : Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 9 , No. 1 2013*
- Kabeer, N. 2003. *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and The Millennium Development Goals. A Handbook for Policy-Makers and Other Stakeholders*. The Commonwealth Secretariat, London, UK.
- Lawang, R. M.Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik : Suatu Pengantar*. Jakarta : FISIP UI PRESS
- Leksono, S. 2009. *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional : Perspektif Etnic Kualitatif*. Malang : CV Citra Malang
- Littrell. R. F. 2007. "Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager", *International journal of intercultural relations*, Vol. 31, No, 1, PP: 87-110.
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan 1. Surakarta : UNS Press
- Nordiansyah, E. 2017. *Peningkatan IPM Indonesia Di Tengah Tingginya Ketimpangan*. Edisi 17 april 2017 diakses dari <http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/dN6gjGpb-peningkatan-ipm-indonesia-di-tengah-tingginya-ketimpangan> pada 3 Agustus 2017 jam 10.23 WIB
- Slamet, Y. 2012. *Kemiskinan Petani Pedesaan Analisis Mengenai Sebab-sebab dan Alternatif Pemecahannya*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Laboratorium Sosiologi di FISIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET . Surakarta. Diakses dari http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsociologi.fisip.uns.ac.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2012%2F02%2FKEMISKINAN-PETANIPEDESAAN.pdf&ei=h53VUvbNdsO_rgfPz4CACQ&usg=AFQjCNEzz2T2fb-x9t7JYOIZR1EiZBXzeg&bvm=bv.59378465,d.bmk diakses pada 3 Agustus 2017 jam 15.35 WIB
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: GayaMedia.
- Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI. 2010. *Pembangunan Sosial : Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik*. Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
- Tim Viva. 2017. *Penyebab Indeks Pembangunan*

- Manusia Menurun*. Edisi 27 Maret 2017 diakses dari <http://www.viva.co.id/berita/dunia/898554-penyebab-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-menurun> pada 3 Agustus 2017 jam 10.04 WIB
- Tubbs, S, and Moss, M .2000. *Human communication*, 8 Edition: McGraw-Hill.
- Vecchio, R.2000. *Organizational Behavior*, 4 Edition, Horcourt.
- Widjajanti, K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1*
- Wijaya, M. 2007. *Perspektif Sosiologi Ekonomi : dari Masyarakat pra Kapitalis hingga Kapitalisme Neo-liberal*. Surakarta : Lindu Pustaka.
- Winarno, B. 2011. *Isu-Isu Global Kontenporer*. Yogyakarta : CAPS
- <http://www.rednosefoundation.org>, diakses pada 3 Agustus 2017 jam 11.25 WIB